

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

2019

**DINAS TENAGA KERJA
KOTA BANDUNG**



RINGKASAN EKSEKUTIF (Executive Summary)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2019 merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam mencapai sasaran strategis yang disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2019 disusun melalui pengukuran indikator kinerja Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja dalam dokumen-dokumen perjanjian kinerja dengan hasil pengukuran kinerja. Berikut Realisasi pencapaian target sebagaimana di bawah ini :

Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Tahun 2019

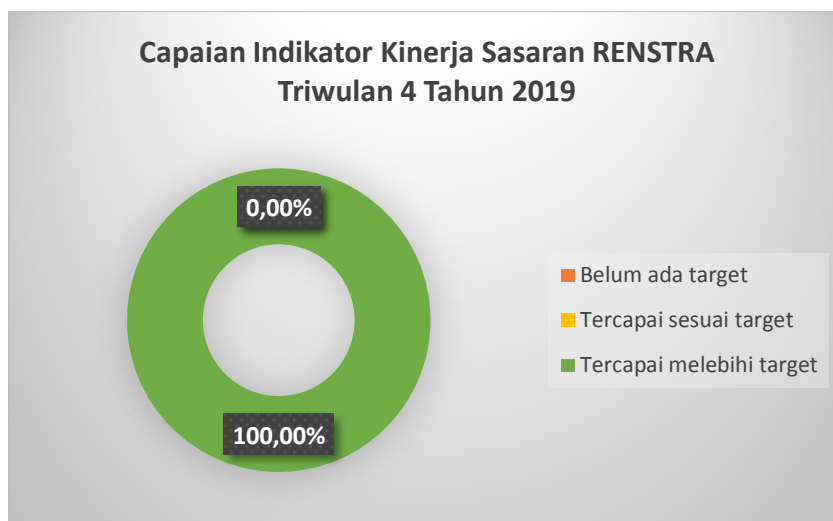
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2019	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Target Triwulan 2	Realisasi Triwulan 2	Target Triwulan 3	Realisasi Triwulan 3	Target Triwulan 4	Capaian Kinerja
1	Prosentase Pengangguran yang Kompeten dan ditempatkan	%	9.25	n/a	0	n/a	0	n/a	0	9.25	0
2	Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	%	45.30	26.67	54.06	35.16	45.07	41.13	46.23	45.30	202.70
3	Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru	Orang	9.200	1.700	5.750	4.200	10.845	6.700	12.700	9.200	338.24
4	Rasio Penyelesaian Kasus Perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)	%	58.00	56.00	56.00	56.00	56.00	57.33	57.33	58.00	100
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79.00	n/a	0	n/a	0	79.00		79.00	n/a
6	Temuan BPK/Inspektorat diselesaikan	Predikat	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP	WDP		WDP	WTP

Target Kinerja pokok dalam RENSTRA menjadi Indikator Kinerja Utama yaitu nomor 1 sampai nomor 4 seperti tersebut di atas dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani Kepala Dinas Tenaga Kerja dengan Walikota Bandung, kemudian target kinerja nomor 5 sampai 6 adalah target kinerja RENSTRA yang mendukung atas ketercapaian 4 target IKU. Realisasi target pendukung sebagaimana di bawah ini:

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja Sasaran Renstra	Satuan	exiting tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi triwulan 4	Capaian Kinerja
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori	80.29	79,00	82,19	104,03
2.	Temuan BPK/Inspektorat Diselesaikan	Kategori	-	WDP	WTP	WTP

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Tahun 2018 ditetapkan 4 sasaran dengan 5 indikator sasaran, hasil pengukuran terhadap Indikator kinerja sasaran sebagai berikut:



- 6 indikator atau 100.00% tercapai melebihi target dengan kategori sangat baik

Pengukuran Kinerja 4 (empat) Sasaran RENSTRA dengan 6 (enam) indikator kinerja dikelompokkan berdasarkan kategori dengan interpretasi, sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Sasaran RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Tidak Ada Target	-
2	Tidak Tercapai	-
3	Tercapai sesuai target	-
4	Melebihi Target	6
Jumlah		6

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci sesuai Misi dan Sasaran, rata-rata capaian dari pengukuran kinerja dapat dilihat dalam tabel, sebagai berikut:

Capaian Kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung triwulan 4 Tahun 2019

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian Sasaran	n/a	< 100%	= 100%	>100%
I	Misi 3: Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan						
1.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Prosentase Pengangguran yang Kompeten dan Ditempatkan		-	-	-	117.51
2.	Meningkatnya Penempatan Kerja	Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	119.785	-	-	-	100.52
		Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru		-	-	-	139.05
3.	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Rasio Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)	100.79	-	-	-	100.79
6.	Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	104.03	-	-	-	104.03
		Temuan BPK/Inspektorat diselesaikan		-	-	-	WTP

PENGANTAR

Sebagai sebuah organisasi, Instansi Pemerintah semakin dituntut untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuan menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai penyampaian/komunikasi capaian kinerja dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/ ketidakberhasilan kinerja. Pelaporan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang isinya adalah penjelasan mengenai kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu instrumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2019 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memenuhi Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018, adapun maksud disusunnya LKIP ini adalah :

- a. Sebagai media hubungan kerja organisasi yang berisi informasi dan data yang telah diolah.

- b. Sebagai wujud pertanggungjawaban suatu organisasi Instansi Pemerintah kepada pemberi wewenang dan pemberi mandat.
- c. Sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi instansi pemerintah.
- d. Sebagai media informasi tentang sejauhmana pelaksanaan prinsip – prinsip *good governance* termasuk penerapan fungsi – fungsi manajemen secara benar pada instansi yang bersangkutan.

Tidak semua rencana dapat berjalan sesuai dengan harapan, namun demikian dengan adanya laporan akuntabilitas kinerja ini kami berharap dapat memperoleh umpan balik untuk peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung melalui perbaikan penerapan fungsi – fungsi manajemen sesuai aturan mulai dari **perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan pencapaian kinerja**, hingga dapat mengetahui/mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan lingkungannya terhadap organisasi Instansi Pemerintah.

Bandung, Desember 2019
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Bandung

DRS. ARIEF SYAIFUDIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19690111 199603 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
Ringkasan Eksekutif	i
Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	x
Daftar Lampiran	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Isu Strategis	3
1.4 Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2019.....	6
2.1 Rencana Strategis dan Target Tahun 2019.....	6
2.2 Target Indikator Kinerja Utama (IKU)	8
2.3 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	9
2.4 Perencanaan Keuangan Tahun 2019	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019.....	13
3.1 Capaian IKU Dinas Tenaga Kerja Tahun 2019.....	12
3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	12
3.1.2 Capaian Indikator Kinerja.....	16
3.2 Capaian Kinerja Tahun 2019.....	18
a. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1	23
b. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2	26
c. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3	32
d. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 4	37
3.3 Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	45
3.4 Akuntabilitas Keuangan	55
BAB IV KESIMPULAN / PENUTUP	55
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bandung Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2019	8
Tabel 2.2	Rincian Target Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Hasil Reviu Tahun 2019	9
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2019	10
Tabel 2.4	Pagu Anggaran 2019 Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2019	10
Tabel 3.1	Tujuan, Indikator Tujuan Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2018-2023 Tahun 2019	14
Tabel 3.2	Sasaran dan Indikator Kinerja RENSTRA Tahun 2019	14
Tabel 3.3	Sasaran dan Indikator Kinerja RENSTRA Setelah Reviu Tahun 2018	15
Tabel 3.4	Sasaran dan Indikator Kinerja RENSTRA Setelah Reviu Tahun 2019	15
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan Renstra Tahun 2018 dan 2019	16
Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja Tujuan RENSTRA Tahun 2019	17
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2019 dibanding Tahun sebelumnya, dan Tahun 2018	17
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Bandung Urusan Ketenagakerjaan Berdasarkan RPJMD 2018-2023 Tahun 2019	19
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2019 dibanding Tahun sebelumnya dan Tahun 2018	22
Tabel 3.9	Perkembangan Wirausaha Baru Berbasis Masyarakat, Kompetensi dan Berbasis Kewirausahaan Tahun 2013-Tahun 2018	22
Tabel 3.10	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja dalam upaya Peningkatan Kesempatan Kerja Tahun 2019	23

Tabel 3.11	Target Prosentase Pengangguran yang kompeten dan ditempatkan sesuai RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023	24
Tabel 3.12	Rincian Data Pendukung Capaian Kinerja Sasaran 1	25
Tabel 3.13	Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja Sasaran 1	26
Tabel 3.14	Analisis Efisiensi dan Efektifitas Sasaran 1 Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja Tahun 2019	26
Tabel 3.15	Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2019	27
Tabel 3.16	Perkembangan Lowongan Pekerjaan Tahun 2018-2023	28
Tabel 3.17	Perbandingan Target dan Realisasi Lowongan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2019	28
Tabel 3.18	Pencapaian Indikator Sasaran 3 Tahun 2018-Tahun 2019	29
Tabel 3.19	Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung capaian kinerja Sasaran 2	32
Tabel 3.20	Analisis Efisiensi dan Efektifitas Sasaran 2 Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja Tahun 2019	32
Tabel 3.21	Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2019	33
Tabel 3.22	Capaian Perkembangan Kasus yang masuk dan kasus selesai melalui Perjanjian Bersama (PB) Tahun 2018-2019	33
Tabel 3.23	Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja Sasaran 3	36
Tabel 3.24	Analisis Efisiensi dan Efektifitas Sasaran 3 Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja Tahun 2019	37
Tabel 3.25	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2018-2019	37
Tabel 3.26	Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2019	38
Tabel 3.27	Tanggapan Responden Terhadap Pelayanan Bidang-Bidang Tahun 2019	39
Tabel 3.28	Analisis Efisiensi dan Efektifitas Sasaran 4 Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja Tahun 2019	40
Tabel 3.29	Pencapaian Kinerja Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja	43

Kota Bandung Tahun 2019

Tabel 3.30	Capaian Kinerja Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2019	41
Tabel 3.31	Pencapaian Target Misi Renstra Tahun 2019	42
Tabel 3.32	Kategori Pencapaian Indikator Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2019	43
Tabel 3.33	Rencana Aksi Dinas Tenaga Kerja Periode 2018-2023 Tahun 2019	45
Tabel 3.34	Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Berdasarkan Misi RENSTRA Tahun 2019	53

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019	18
Grafik 3.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Renstra Tahun 2019	19
Grafik 3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019	22
Grafik 3.4	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Renstra Tahun 2019	23
Grafik 3.5	Perkembangan Lowongan Pekerjaan 2018-2019	28
Grafik 3.6	Perbandingan Target dan Realisasi Lowongan Kerja Disnaker Kota Bandung Tahun 2019	29
Grafik 3.7	Perbandingan Loker, Pencari Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2018-2019	30
Grafik 3.8	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2019	30
Grafik 3.9	Perbandingan Kasus yang masuk dan Kasus yang selesai melalui Perjanjian Bersama Tahun 2018-2029	34
Grafik 3.10	Pencapaian Target Misi Renstra Tahun 2019	42
Grafik 3.11	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Renstra	43
Grafik 4.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA Tahun 2019	55



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2019 mengacu kepada Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Adapun pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban setiap instansi pemerintah. Dalam penyusunan laporan kinerja diperlukan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja dipergunakan sebagai :

1. Sarana/instrumen penting untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
2. Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat asas (konsisten);
3. Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan;
4. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja; dan
5. Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.



1.2. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2019 ini disusun berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
- g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- h. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Pembentukan tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
- i. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005 – 2025;
- j. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018;
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



1.3 Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 menetapkan 8 (delapan) isu strategis Kota Bandung, sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan;
2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Penanggulangan Kemiskinan dan PMKS;
4. Peningkatan Perekonomian Kota;
5. Tata Kelola Pemerintahan;
6. Optimalisasi Infrastruktur dan Penataan Ruang;
7. Lingkungan Hidup Berkualitas dan Optimalisasi Pengelolaan Persampahan;
8. Sinergitas Pembiayaan Pembangunan.

Isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja adalah isu strategis ke-4 (keempat) yaitu **Ketimpangan Ekonomi**. Walaupun capaian kinerja sasaran meningkatnya kesempatan kerja pada tahun ini melebihi target, namun tidak dapat disangkal bahwa jumlah penganggur masih banyak. Berdasarkan sumber data proyeksi penduduk 2010-2020 data Sakernas tahun 2017 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bandung mencapai 8.44% dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 8.01% dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali sebesar 8.16%.

Permasalahan utama (*strategic issued*) di bidang ketenagakerjaan adalah masih tingginya angka pengangguran di Kota Bandung, hal ini disebabkan antara lain meningkatnya warga luar yang datang ke Bandung tanpa memiliki keterampilan khusus, tingkat persaingan kerja tinggi, dan terbatasnya ketersediaan lapangan kerja baru juga memberikan kontribusi pada lambatnya penyerapan tenaga kerja. Penanganan permasalahan tersebut pada prinsipnya merupakan tanggungjawab bersama, melibatkan beberapa *stake holder* termasuk hampir seluruh SKPD, baik dari bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan.

Dari permasalahan tersebut di atas hasil evaluasi dan pemantaun secara mendalam Isu Strategis Urusan Ketenagakerjaan dapat diidentifikasi 4 (empat) isu-isu strategis bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Kota Bandung :



1. Masih tingginya tingkat pengangguran;
2. Masih rendahnya kompetensi, kemampuan dan keterampilan tenaga kerja;
3. Masih kurangnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja/buruh; dan
4. Terbatasnya lokasi transmigrasi dan minimnya pemberangkatan transmigran.

Strategi Urusan Ketenagakerjaan yang disusun untuk mencapai misi 3 RPJMD Kota Bandung 2018-2023 difokuskan pada 4 (empat) aspek utama adalah :

1. Pemberian kesempatan memperoleh pelatihan, peningkatan kompetensi kerja produktivitas tenaga kerja;
2. Mengupayakan perluasan kesempatan memperoleh pekerjaan, dan fasilitasi terciptanya perluasan kerja;
3. Mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis, berkeadilan, dan meningkatnya kesejahteraan pekerja; dan Mewujudkan kesadaran dan kepatuhan pengusaha dan pekerja dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
4. Meningkatkan penempatan transmigrasi dan jumlah pemberangkatan transmigran;
5. Meningkatkan efektifitas dan kualitas kinerja Perangkat Daerah.

1.4 Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi

Teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 ini sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Dinas. Berikut ini uraian prosedur pengumpulan data dinas:

1. Memberi arahan/disposisi kepada Sekretaris untuk melaksanakan pengumpulan data dinas
2. Memberi arahan kepada Ka Sub Bag Keuangan dan Ka Sub Bag Program Data dan Informasi untuk menyiapkan bahan/nota dinas untuk pengumpulan data Dinas sesuai kebutuhan
3. Menerima, menelaah dan selanjutnya bersama Jabatan Fungsional Umum (JFU) mempersiapkan bahan pengumpulan data Dinas.
4. Kepala bidang menyampaikan bahan kebutuhan data dinas.
5. Menerima, menginventarisasi data dinas dari semua bidang kemudian diserahkan kepada Ka Sub Bag Keuangan dan Ka Sub Bag Program Data dan Informasi.



6. Menerima hasil inventarisasi data dari seluruh bidang;

7. Menerima dan menelaah rekapitulasi data dari bidang sesuai kebutuhan kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja;
8. Menerima, dan mengoreksi data dinas;
9. Menggandakan dan mengarsipkan data dinas;
10. Jika dibutuhkan oleh Instansi terkait dapat menyampaikan / mengirimkan data ke Instansi terkait sesuai permintaan.



BAB II

P ERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Rencana Strategis dan Target Tahun 2019

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dari Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 800/433/SK/DISNAKER/2019 tentang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2018-2023, serta Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 800/419-DISNAKER/2019 tentang Penunjukan Tim Renstra dan Iku pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2019.

Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung disusun selaras dengan Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional, secara simultan sesuai proses tahapan penyusunan RPJMD Kota Bandung.

Tahun 2018-2023 yang diawali pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, dan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dan *stakeholder* yang berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.



Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Periode 2018-2023 merupakan Tahap III (ketiga) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025. Visi RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, merupakan Visi yang selaras dengan Visi Kota Bandung Yang Bermartabat tahun 2025. Kriteria capaian Visi Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 secara jelas direfleksikan pada Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023 yaitu :

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN SEJAHTERA DAN AGAMIS”

Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan pembangunan kedepan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. **Misi Pertama**, Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing.
2. **Misi Kedua**, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani.
3. **Misi Ketiga**, Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan.
4. **Misi Keempat**, Mewujudkan Bandung Nyaman, Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan.
5. **Misi Kelima**, Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi.

Dengan memperhatikan penjabaran Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung diatas, maka pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dengan misi ketiga.

2.2. Target Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Mengacu pada Keputusan Walikota Bandung Surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 800/433/SK/DISNAKER/2019 tentang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2018-2023, serta Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 800/419-DISNAKER/2019 tentang Penunjukan Tim Renstra dan Iku pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2019.

Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Urusan Ketenagakerjaan Kota Bandung Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bandung
Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan 1	Target Triwulan 2	Target Triwulan 3	Target Triwulan 4
1.	Prosentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	26.67	35.16	41.13	45.30
2.	Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru	Orang	1.700	4.200	6.700	9.200

Sumber Data : RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

2.2.1. Indikator Kinerja Utama RENSTRA Tahun 2018-2023

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 800/419-DISNAKER/2019 tentang Penunjukan Tim Renstra dan Iku pada Dinas



Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2019 Rincian Target Indikator Kinerja Utama dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rincian Target Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Hasil Reviu Tahun 2019

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA
			TAHUN 2019					
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Prosentase Pengangguran yang Kompeten dan ditempatkan	%	9.25	9.25	9.38	9.50	9.63	9.75	9.75
Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	%	45.30	45.30	45.56	45.65	45.90	46.15	46.15
Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru	Orang	9.200	9.200	9.900	10.100	10.300	10.500	10.500
Rasio Penyelesaian Kasus Perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)	%	58.00	58.00	58.00	58.00	59.00	59.00	59.00

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2019
Indikator kinerja tersebut di atas selaras dengan Target RPJMD Kota Bandung 2018-2023.

2.3. Target Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Penetapan Kinerja yang dituangkan dan ditandatangani dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala SKPD dengan Walikota Bandung merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019. Perjanjian Kinerja Tahun 2019



sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja
Kota Bandung Tahun 2019

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1. Prosentase Pengangguran yang Kompeten dan ditempatkan	%	9.25
2.	Meningkatnya penempatan Kerja	2. Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	%	46.15
		3. Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru	Orang	9.200
3.	Meningkatnya Hubungan industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	4. Rasio Penyelesaian Kasus Perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)	%	58.00
4.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik	5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79.00
		6. Temuan BPK/Inspektorat diselesaikan	Predikat	WDP

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2019

2.4. Perencanaan Keuangan Tahun 2019

Pada Tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dengan perencanaan Keuangan setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung total nilai sebesar **Rp. 29.025.252.186,06** pada tabel sebagai berikut

Tabel 2.4
Pagu Anggaran Tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja

No	Program	Pagu Anggaran Tahun 2019
1	2	3



No	Program	Pagu Anggaran Tahun 2019
1	2	3
Sasaran 1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.049.409.818.00
2	Program peningkatan kesempatan kerja	2.242.000.495.80
Total		4.291.410.313.80
Sasaran 2	Meningkatnya Penempatan Kerja	
3	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	2.031.179.385.00
4	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	132.758.600.00
Total		2.163.937.985
Sasaran 3	Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan	
5	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	2.562.601.866.08
Total		2.562.601.866.08
Sasaran 4	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik	
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.388.747.763.00
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	16.492.054.258.04
8	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	126.500.000.00
Total		20.007.302.021
JUMLAH KESELURUHAN		29.025.252.186.06



BAB III

Akuntabilitas kinerja

3.1 Capaian IKU Dinas Tenaga Kerja Tahun 2019

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Selanjutnya setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Misi dan Visi Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing.

Sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran

Penilaian capaian kinerja didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Predikat nilai capaian kinerjanya sesuai dengan Silakip Online Kota Bandung, sebagai berikut :



No.	Prosentase	Interpretasi
1.	n/a	Tidak Ada Target
2.	< 100 %	Tidak Tercapai
3.	= 100 %	Tercapai
4.	> 100 %	Melebihi Target

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh Silakip Kota Bandung yang dibangun oleh Bagian Organisasi Pemberdayaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kota Bandung, dengan kriteria n/a jika tidak ada target, dibawah 100% diinterpretasikan tidak tercapai, sama dengan 100% interpretasi tercapai, dan di atas 100% interpretasi melebihi target.

Dalam laporan ini, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2018-2023, dan Indikator Kinerja Utama Kota Bandung telah ditetapkan sesuai sasaran RPJMD 2018-2023 dengan 4 (empat) indikator kinerja (*outcomes*) yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bandung Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2019 terdapat dalam Sasaran Misi 3 RPJMD 2018-2023, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka; dan Indeks kepuasan Masyarakat yang didasarkan pada Tujuan: “Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja Untuk Mendorong Peningkatan Kesempatan Kerja” Sasaran: “meningkatnya kesempatan kerja dan menurunnya jumlah masyarakat miskin”.

Hasil Pra Evaluasi yang dilaksanakan Tim Kemmenpan & RB pada tanggal 24 Juni 2015 disarankan adanya indikator kinerja tujuan yang merupakan sari atau resume dari indikator sasaran, dapat juga diambil dari indikator sasaran yang paling pokok, sebagai berikut :



Tabel 3.1
Tujuan, Indikator Tujuan Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Tahun 2018 – 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA
					2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja untuk mendorong Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8.39	8.39	8.34	8.29	8.25	8.22	8.22
2.	Meningkatkan Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	79.00	5.00	79.25	79.50	79.75	80.00	80.00

Untuk menunjang realisasi pencapaian target tersebut di atas, Renstra yang dituangkan pada Bab 2, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung mempunyai 4 sasaran dan 6 indikator kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator

Sasaran dan indikator kinerja Renstra Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum pada tabel di bawah :

Tabel 3.2
Sasaran dan Indikator Kinerja RENSTRA
Tahun 2019

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1. Prosentase Pengangguran yang Kompeten dan ditempatkan
2.	Meningkatnya penempatan Kerja	2. Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan
3.	Meningkatnya Hubungan industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	3. Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru 4. Rasio Penyelesaian Kasus Perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)
4.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik	5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 6. Temuan BPK/Inspektorat diselesaikan



dalam sasaran dan indikator RENSTRA tersebut ditentukan 4 Sasaran dan 6 Indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu sasaran 1 sampai dengan sasaran 3 memiliki 4 indikator Serta 1 sasaran dan 2 Indikator menjadi sasaran pendukung atas capaian kinerja IKU. Perubahan Sasaran dan indikator kinerja Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2019 mengalami beberapa perubahan sasaran dan indikator yang disesuaikan dengan sasaran, indikator, target RPJMD dan renstra Tahun 2018-2023. Perubahan sasaran dan indikator dapat dilihat perubahannya sebagaimana tercantum dibawah ini :

Tabel 3.3
Sasaran dan Indikator Kinerja RENSTRA Setelah Reviu
Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)
1. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	1. Jumlah Calon Wirausaha Baru
2. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	2. Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru
	3. Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan
3. Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan	4. Prosentase Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)
4. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik	5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sasaran dan indikator RENSTRA tahun 2018 tersebut ditentukan Sasaran 1 sampai dengan sasaran 3 dengan 4 indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), dan sasaran 4 dengan 1 indikator menjadi sasaran pendukung atas capaian kinerja IKU.

Tabel 3.4
Sasaran dan Indikator Kinerja RENSTRA
Tahun 2019

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1. Prosentase Pengangguran yang Kompeten dan ditempatkan	%	9.25
2.	Meningkatnya penempatan Kerja	2. Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	%	46.15
		3. Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru	Orang	9.200



3.	Meningkatnya Hubungan industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	4. Rasio Penyelesaian Kasus Perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)	%	58.00
4.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik	5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79.00
		6. Temuan BPK/Inspektorat diselesaikan	Predikat	WDP

Sasaran dan indikator RENSTRA tahun 2019 ditentukan Sasaran 1 sampai dengan sasaran 3 dengan 4 indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), dan sasaran 4 dengan 2 indikator menjadi sasaran pendukung atas capaian kinerja IKU.

3.1.2. Capaian Indikator Kinerja

A. Capaian Indikator Kinerja Tujuan

Capaian indikator kinerja tujuan tahun 2019 terdiri dari 2 (dua) tujuan dengan 2 (dua) indikator tujuan hal tersebut dapat dilihat sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan RENSTRA
Tahun 2018 dan 2019

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	KONDISI TAHUN 2018	TARGET Tahun 2019	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja untuk Mendorong Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8.01	8.39	8.16	97.25%
2.	Meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai	80.29	79.00	82.19	104.03%

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah kondisi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT Kota Bandung pada Tahun 2019 meningkat 0,15 persen dari Tahun 2018 waupun kenaikannya tidak signifikan, kenaikan ini dipengaruhi oleh bertambahnya lulusan SMA, SMK dan Sarjana namun sedikit lapangan kerja seiring dengan kondisi pertumbuhan ekonomi K



Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Tujuan RENSTRA
Tahun 2019

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja untuk Mendorong Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8.39	8.16	97.25%
2.	Meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai	79.00	82.19	104.03%

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Bandung

Setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bandung yang berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan capaiannya sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2019
dibanding Tahun sebelumnya, dan Tahun 2018

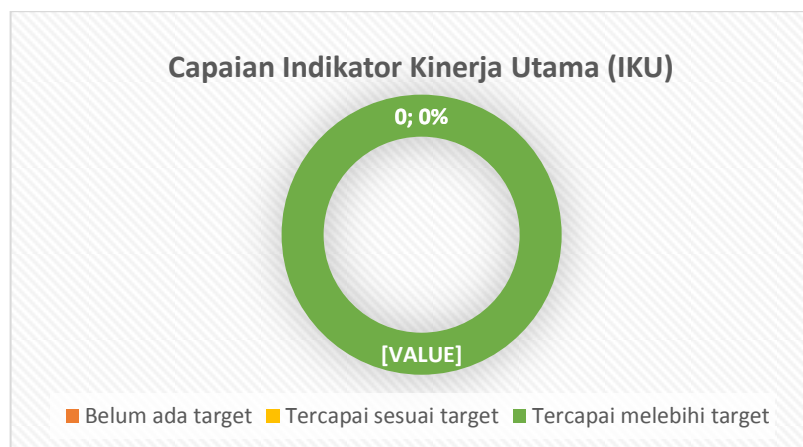
No	Indikator Kinerja Sasaran Renstra	Satuan	Tahun 2018	Triwulan Tahun 2019		Capaian Kinerja	Target Akhir 2019	Target Akhir Renstra	Capaian Kinerja
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	
1.	Prosentase Pengangguran yang Kompeten dan ditempatkan	%	0	9.25	10.87	117.51%	9.25	9,75	111.49%
2.	Prosentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	%	50.96	45.30	45.54	100.52%	45,30	46,15	98,69%
3.	Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru	Orang	13.617	9.200	12.793	139.05%	9.200	10.500	121,84%



4	Rasio Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	%	58.00	58.00	58.46	100.79%	58.00	59	99,08%
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	80.29	79.00	82.19	104.03%	79.00	80	102,74%
6	Temuan BPK/Inspektorat diselesaikan	Predikament	-	WDP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP

Tahun 2019 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bandung dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2018 - 2023, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator - indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung.

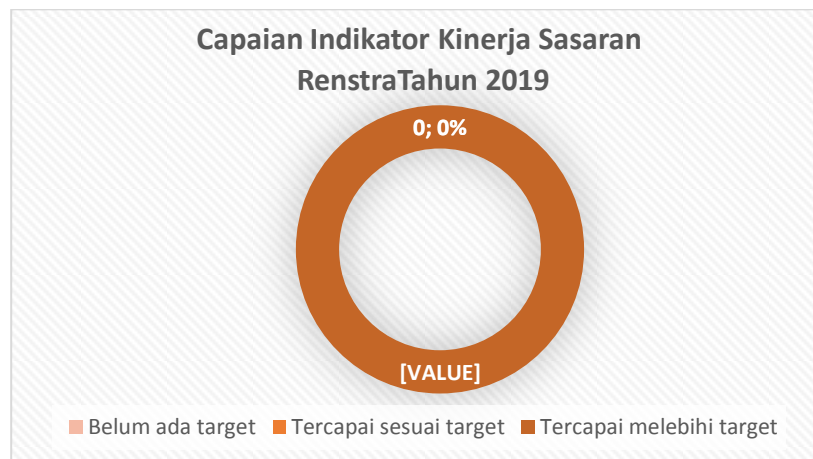
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja yang masuk dalam IKU Kota Bandung sebanyak 4 indikator kinerja utama dan 2 indikator penunjang dengan rincian capaian : 6 Indikator tercapai melebihi target. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama sebagai berikut :



Grafik 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019



Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2019 ditetapkan 4 sasaran dengan 6 indikator sasaran, hasil pengukuran terhadap Indikator kinerja sasaran sebagai berikut:



Grafik 3.2

Capaian Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA Tahun 2019

6 indikator atau 100.00% tercapai melebihi target dengan kategori sangat baik

Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8

Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Bandung Urusan Ketenagakerjaan Berdasarkan RPJMD 2018-2023 Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2019	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Target Triwulan 2	Realisasi Triwulan 2	Target Triwulan 3	Realisasi Triwulan 3	Target Triwulan 4	Realisasi Triwulan 4	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Prosentase Pengangguran yang Kompeten dan ditempatkan	%	9.25	n/a	0	n/a	0	n/a	0	9.25	10.87	117.51
2	Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	%	45.30	26.67	54.06	35.16	45.07	41.13	46.23	45.30	45.54	100.52
3	Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru	Orang	9.200	1.700	5.750	4.200	10.845	6.700	12.700	9.200	12.793	139.05



4	Rasio Penyelesaian Kasus Perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)	%	58.00	56.00	56.00	56.00	56.00	57.33	57.33	58.00	58.46	100.79
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79.00	n/a	0	n/a	0	79.00	0	79.00	82.19	104.03
6	Temuan BPK/Inspektorat diselesaikan	Predikat	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP

Dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dan Lapangan Pekerjaan Baru masuk kedalam Misi Ketiga “**Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan**”, dengan sasaran 1 **Meningkatnya Kesempatan Kerja** Pada Tahun 2019 Sasaran 1 Meningkatkan Kesempatan Kerja memiliki 1 (satu) indikator yang merupakan turunan dari target RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 yang terdapat di Misi 3 Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh dan berkeadilan; sasaran 1 (satu) meningkatnya Kesempatan Kerja dengan Indikator Kinerja sasaran yaitu Prosentase Pengangguran yang Kompeten dan ditempatkan adalah jumlah tenaga kerja yang kompeten dan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dibanding jumlah pengangguran dikali 100 persen. Pada Tahun 2019 Jumlah Tenaga Kerja kompeten terdiri dari 130 SMK dengan jumlah lulusan yang kompeten sebanyak 30 orang dan jumlah LPK sebanyak 12 LPK dengan perkiraan lulusan yang memiliki kompetensi sebanyak 60 orang per tahun ditambah dengan target jumlah pemagangan di bidang pelatihan dan produktivitas di bidang Lattas sebanyak 40 Orang dan Peserta pelatihan yang telah memiliki sertifikasi sebanyak 160 orang ditambah 5 orang lulusan Balai Besar Pengembangan Pelatihan Kerja (BBPLK) ditambah jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 4.100 orang disbanding dengan jumlah data pengangguran di kota Bandung (sumber data BPS) sebanyak 96.465 orang. Pada Tahun 2019 Prosentase Pengangguran yang kompeten dan ditempatkan memiliki target 9.25% dengan capaian kinerja tercapai melebihi target sebesar 117.51%.

Sasaran : Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja Capaian Kinerja Indikator (2) Prosentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan didukung oleh target kinerja Dinas Tenaga Kerja dengan indikator “Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru” tahun 2019 yaitu 45.30% dan terealisasi sebesar 45.54% dengan Target lowongan pekerjaan 9.200



dan realisasi sebanyak 12.793 lowongan kerja dan capaian kinerja sebesar 139.05% tercapai melebihi target.

Ketercapaian target lowongan kerja disebabkan karena banyak perusahaan yang melaporkan lowongan kerja kepada Dinas Tenaga Kerja dan adanya kegiatan pameran bursa tenaga kerja.

membandingkan target di akhir tahun RPJMD dan RENSTRA tahun 2018-2023 sebanyak 14.000 Lowongan Pekerjaan Baru, dengan realisasi 13.617 Lowongan Kerja

Baru tercapai 97.26% tidak tercapai target. Peningkatan penempatan tenaga kerja akan terjadi apabila kompetensi tenaga kerja meningkat. Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat harus menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dalam upaya perluasan kesempatan kerja atau penciptaan lapangan pekerjaan baru. Pemerintah Daerah mempunyai target penciptaan wira usaha baru melalui program pelatihan-pelatihan orientasi penempatan tenaga kerja atau penciptaan wira usaha baru mandiri. Semua unsur dan potensi diberdayakan dalam membangun kepekaan dan kepedulian aparaturnya daerah dan masyarakat untuk mengatasi masalah pengangguran. Penyusunan kebijakan dan strategi program kegiatan harus terarah.

Salah satu tolak ukur keberhasilan kebijakan nasional dan regional adalah mampu meningkatkan perluasan kesempatan kerja dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran. (penjelasan selanjutnya dibahas di analisa capaian kinerja Sasaran 1 RENSTRA Disnaker pada Indikator yang sama).

3.2 Capaian Kinerja Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2019 tetap mengacu pada Dokumen RPJMD 2018-2023 Kota Bandung, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi menjadi perhatian pula dalam penyusunan target kinerja.

IKU adalah target utama yang merupakan indikator kelompok program Urusan Pemerintahan yaitu indikator inti atau *core bussinesnya* tugas pokok dan fungsi pemerintah di bidang Ketenagakerjaan, dan berdasarkan Mengacu pada Keputusan Walikota Bandung tentang Indikator Kinerja Utama Kota Bandung Tahun 2018-2023, diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 800/419 DISNAKER tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2019. Realisasi pencapaian target sebagaimana di bawah ini :

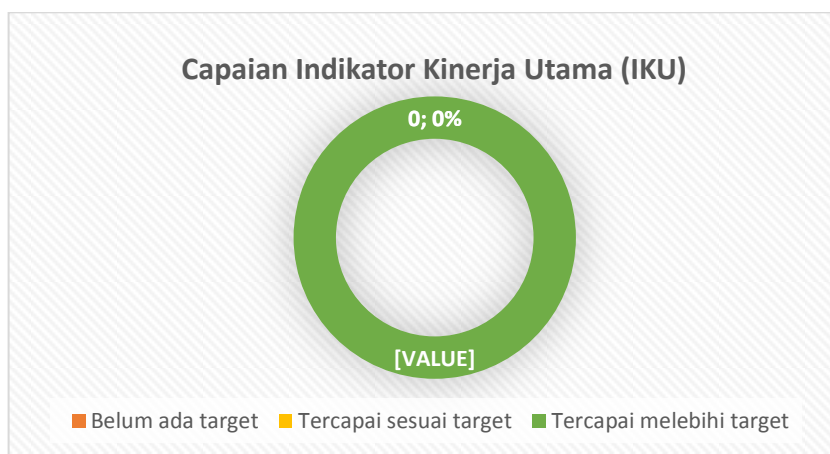


Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2019
dibanding Tahun sebelumnya, dan Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Existing 2018	Tahun 2019		Prosentase Capaian Kinerja	Target Akhir Renstra (Tahun 2019)
				Target	Realisasi		
1.	Prosentase Pengangguran yang Kompeten dan ditempatkan	%	0	9.25	10.87	117.51	9.25
2.	Prosentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	%	50.96	45.30	45.54	100.52	45,30
3.	Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru	Orang	13.617	9.200	12.793	139.05	9.200
4.	Rasio Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	%	58.11	58.00	58.46	100.79	58.00
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	80.29	79.00	82.19	104.03	79.00
6.	Temuan BPK/Inspektorat diselesaikan	Predikat	0	WDP	WTP	WTP	WDP

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja yang masuk dalam IKU Kota Bandung sebanyak **6 indikator atau 100.00% tercapai melebihi target dengan kategori sangat baik**

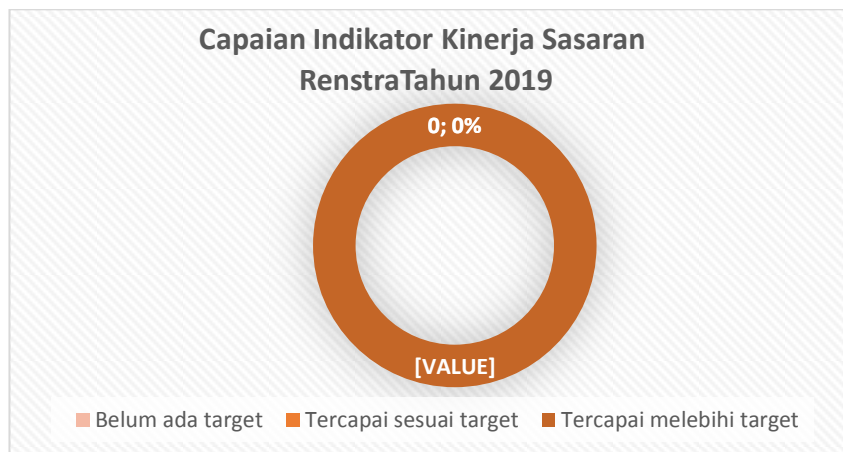
Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama sebagai berikut:



Grafik 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019



Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Tahun 2019 ditetapkan 4 sasaran dengan 6 indikator sasaran, hasil pengukuran terhadap Indikator kinerja sasaran sebagai berikut:



Grafik 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA Tahun 2019

6 indikator atau 100.00% tercapai melebihi target dengan kategori sangat baik

a. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1 (Meningkatnya Kesempatan Kerja)

Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja dalam upaya Peningkatan Kesempatan Kerja mempunyai 1 (satu) indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja dalam upaya Peningkatan Kesempatan Kerja
Tahun 2019-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Existing 2018	Tahun 2019		Prosentase Capaian Kinerja	Target Akhir Renstra (Tahun 2019)
				Target	Realisasi		
1.	Prosentase Pengangguran yang kompeten dan ditempatkan	%	-	9.25	10.87	-	9.25

● **Indikator Prosentase Pengangguran yang kompeten dan ditempatkan**

Indikator Pertama adalah turunan dari target RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 : Pada Tahun 2019 Sasaran 1 Meningkatkan Kesempatan Kerja memiliki 1 (satu)



indikator yang merupakan turunan dari target RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 yang terdapat di Misi 3 Membangun perekonomian yang mandiri, dan berkeadilan; sasaran 1 (satu) meningkatnya Kesempatan Kerja dengan Indikator Kinerja sasaran yaitu Prosentase Pengangguran yang Kompeten dan ditempatkan adalah jumlah tenaga kerja yang kompeten dan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dibanding jumlah pengangguran dikali 100 persen. Pada Tahun 2019 Jumlah Tenaga Kerja kompeten terdiri dari 130 SMK dari 3.900 orang lulusan SMK/Tahun dengan jumlah lulusan yang kompeten sebanyak 30 orang dan jumlah LPK sebanyak 12 LPK dengan perkiraan lulusan yang memiliki kompetensi sebanyak 60 orang per tahun ditambah dengan target jumlah pemagangan di bidang pelatihan dan produktivitas di bidang Lattas sebanyak 40 Orang dan Peserta pelatihan yang telah memiliki sertifikasi sebanyak 160 orang ditambah 5 orang lulusan Balai Besar Pengembangan Pelatihan Kerja (BBPLK) ditambah jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 4.100 orang disbanding dengan jumlah data pengangguran di kota Bandung (sumber data BPS) sebanyak 96.465 orang. Pada Tahun 2019 Prosentase Pengangguran yang kompeten dan ditempatkan tidak ada target (n/a) dikarenakan perhitungan target dan capaian realisasi lulusan yang kompeten pada beberapa Lembaga baru dapat diketahui capaiannya pada akhir tahun sehingga capaian kinerja prosentase pengangguran yang kompeten dan ditempatkan ditargetkan pada akhir triwulan yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.11

Target prosentase pengangguran yang kompeten dan ditempatkan sesuai RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Prosentase Capaian Kinerja	Target Akhir Renstra (Tahun 2019)	Target Akhir Renstra (Tahun 2023)	Prosentase Capaian Kinerja
			Target	Realisasi				
1.	Prosentase Pengangguran yang kompeten dan ditempatkan	%	9.25	10.87	117.51	9.25	9,75	111.49 %

Realisasi dari indikator untuk sasaran tersebut di atas dengan target sebesar 10.87% pada tahun 2019 tercapai/terrealisasi sebesar 10.87% dengan capaian kinerja sebesar 117.51%

Permasalahan, Dengan adanya Permenaker nomor 17 tahun 2016 yang mengacu ke SKKN I menyebabkan banyaknya LPK belum siap diakreditasi, selain itu juga kurang minatnya warga Kota Bandung untuk mengikuti pelatihan di LPK Swasta. UPT Balai latihan kerja dalam mempersiapkan dan meningkatkan kualitas calon tenaga kerja



untuk memenuhi pasar kerja, tetapi sampai saat ini UPTD BLK Kota Bandung belum mempunyai sarana dan prasarana, pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dilaksanakan bekerjasama dengan LPK, pemerintah maupun swasta sehingga kurang optimal dalam penyelenggaraannya selain itu juga perekrutan peserta pelatihan selama ini hampir 75% didasarkan pada hasil musrenbang. Belum adanya koordinasi antara penyedia pelatihan dengan industri sebagai pemakai tenaga kerja sehingga program pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Penyelesaian permasalahan

Melaksanakan Pembinaan LPK diantaranya dengan melakukan BIMtek Bagi pengelola dan instruktur LPK, Mengadakan sosialisasi LPK yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan lembaga serta melakukan monitoring pelaporan kegiatan LPK. sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, profesional dan produktif merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan di semua sektor. Pengembangan SDM berbasis Kompetensi menjadi keharusan untuk dikembangkan di semua sektor yang dapat dilakukan melalui tiga jalur utama yaitu pendidikan profesi, pelatihan kerja dan atau pengembangan karir di tempat kerja.

Faktor Pendukung

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perijinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja. selain itu juga Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dari Tahun 2018 – 2023 mengalami fluktuatif bergantung pada permintaan/ kebutuhan dari masyarakat melalui Musrenbang dan juga adanya ketersediaan anggaran serta melakukan Pembinaan ke LPKS yang ada di Kota Bandung.

Realisasi capaian kinerja pada indikator prosentase pengangguran yang kompeten dan ditempatkan didukung dengan data sebagai berikut:

Tabel 3.12
Rincian Data Pendukung Capaian Kinerja Sasaran 1

Sasaran	Program dan Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Anggaran (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.870.841.593.00	1.670.486.850.00	89.29
	1. Kegiatan Peningkatan Produktivitas dan Kompetensi Lembaga Pelatihan Kerja	254.933.790.00	246.125.750.00	96.54
	2. Kegiatan keterampilan berbasis penempatan (banprov)	100.000.00	70.059.600	70.06
	3. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi	1.189.676.391.00	1.038.727.800.00	89.52



Pencari Kerja				
4.	Kegiatan Pemagangan Dalam Negeri	355.551.412.00	315.573.700.00	88.76

Sasaran Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja didukung oleh Program dan kegiatan pendukung capaian kinerja sasaran 1 dengan anggaran dan Realisasinya dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.13
Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja Sasaran 1

Sasaran	Program dan Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Anggaran (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	178.568.225.00	177.996.225.00	99.68
	1. Kegiatan Penyusunan dan Pengelolaan Data dan Informasi Ketenagakerjaan	178.568.225.00	177.996.225.00	99.68

Sasaran Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja dalam upaya Peningkatan Kesempatan Kerja ini tingkat efektifitas sebesar 131.60%, pencapaian ini berasal dari perbandingan antara capaian kinerja sebesar 117.51% dengan penggunaan anggaran realisasi 89.29%. Sedangkan tingkat efisiensi sebesar 28.22% dilihat dari tingkat capaian kinerja dari 1 indikator yang mencapai 117.51% tercapai melebihi target yang ditetapkan dengan penggunaan anggaran untuk mencapai target sebesar 89.29%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Analisis Efisiensi dan Efektifitas Sasaran 1
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Prosentase Pengangguran yang kompeten dan ditempatkan	%	9.25	10.87	117.51	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.870.841.593	1.670.486.850	89.29
							TOTAL PER SASARAN	1.870.841.593	1.670.486.850	89.29
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 28.22 %										
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 131.60 %										

b. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 (Meningkatnya Penempatan Kerja)

● **Prosentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan**

Untuk mengatasi pengangguran musiman, perlu adanya pemberian informasi yang cepat. Salah satu penyebab munculnya masalah pengangguran karena pencari kerja



tidak tahu perusahaan apa saja yang membuka lowongan kerja, atau perusahaan seperti apa yang cocok dengan keterampilan yang dimiliki. Berkat kinerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja yang didukung para Pejabat fungsional Pengantar Kerja, target kinerja terlampaui. **Proses Penyediaan Informasi Lowongan Pekerjaan** yang dilakukan adalah melalui Job Fair/Pameran Bursa Kerja,

Tahun 2014 Disnaker melakukan inovasi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan menyusun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Ketenagakerjaan yang diberi nama **BIMMA (Bandung Integrated Manpower Management Applications)**. Pengembangan BIMMA dilanjutkan pada tahun 2015 sehingga ditambah beberapa sub sistem. Sub sistem yang sudah berkaitan dengan penempatan tenaga kerja diantaranya dengan sistem ini memberi kemudahan terhadap perusahaan untuk menyampaikan laporan perusahaannya melalui website Wajib Laport On-line (*paperless*), diantara contentnya perusahaan wajib mengisi format lowongan kerja yang tersedia di perusahaannya, harapan kedepan adalah jumlah lowongan kerja yang tersedia di Kota Bandung meningkat melalui Website tersebut.

Melalui BIMMA pula ada sub sistem Bursa Kerja Online dan aplikasi bagi ponsel pintar yang berada di bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar pencari kerja dapat menemukan informasi kerja dan melamar online. Target lowongan kerja pada tahun 2019 sebanyak 9.200 loker, dapat direalisasikan sebanyak 12.793 lowongan kerja, berarti capaian kinerja melebihi target. Data capaian penempatan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Existing Tahun 2018	Tahun 2019		Prosentase Capaian Kinerja	Target Akhir Renstra (Tahun 2019)
				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	%	44,88%	45.30%	45.54	100.52	45.30

1. Indikator Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru

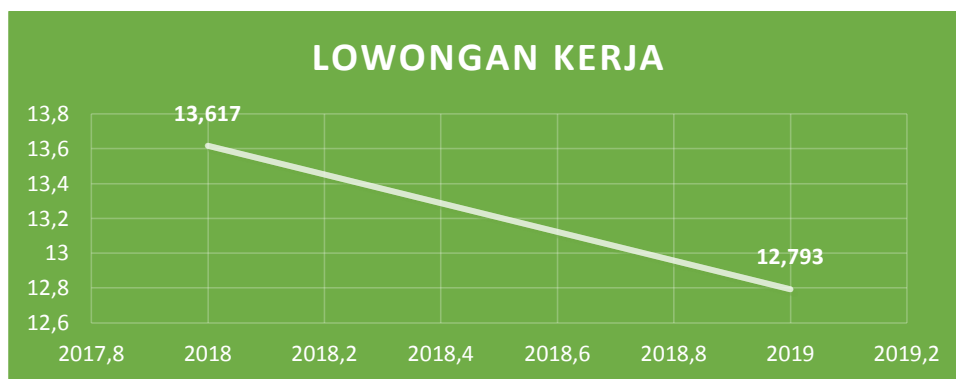
Indikator **Menciptakan 50.000 Lapangan Pekerjaan Baru** dituangkan dalam Dokumen RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, untuk mencapai target tersebut Dinas Tenaga Kerja menetapkan target pada akhir Tahun 2018 Lowongan Pekerjaan Baru sebanyak 50.000 lowongan kerja, dan Tahun 2019 dari target 9.200 Lowongan Kerja Baru, terealisasi sampai akhir tahun 2019 sebanyak 12.793 orang, dipersentase mencapai

139.05%, kategori capaian kinerja melebihi target. Berikut ini tabel perkembangan jumlah lowongan kerja dari tahun 2018-2023, sebagaimana dibawah ini :

Tabel 3.16
Perkembangan Lowongan Pekerjaan Tahun 2018 – 2023

Uraian	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Lowongan Kerja	9.200	9.900	10.100	10.300	10.500

Lebih rincinya dijelaskan pula dalam grafik perkembangan jumlah lowongan kerja dari tahun 2013 – 2019 dibawah ini :



Grafik 3.5

Perkembangan Lowongan Pekerjaan 2018 – 2019

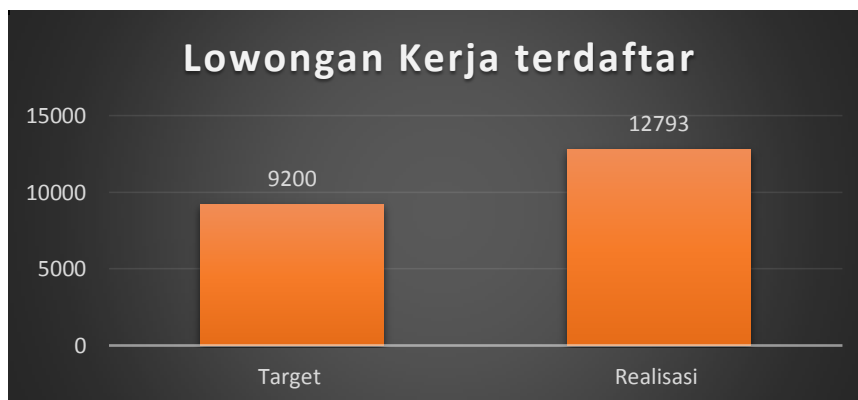
Perbandingan target dan realisasi Jumlah Lowongan Pekerjaan

Berikut ini perbandingan target dan realisasi lowongan pekerjaan yang terdaftar pada Disnaker Kota Bandung :

Tabel 3.17
Perbandingan target dan realisasi Lowongan kerja Disnaker Kota Bandung Tahun 2019

No.	Uraian	Target	Realisasi
1	2	3	4
1.	Lowongan Kerja terdaftar	9.200	12.793

Lebih rincinya dijelaskan pula dalam grafik perbandingan target dan realisasi lowongan pekerjaan dari tahun 2018 – 2019 dibawah ini :



Grafik 3.6

Perbandingan target dan realisasi Lowongan kerja Disnaker Kota Bandung tahun 2019

2. Indikator Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan

Tahun 2019 telah ditetapkan target prosentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan sebesar 45.30% dan dapat direalisasikan sebesar 45.54% kategori melebihi target. Tingginya capaian kinerja sebesar 100.52% dikarenakan adanya kegiatan job fair/pameran bursa kerja sehingga Disnaker Kota Bandung dapat menyelenggarakan selama tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) kali dan Sosialisasi Bursa Kerja Khusus sebanyak 2 (dua) kali yang mendapatkan respon sangat baik oleh warga / pencari kerja di Kota Bandung. Capaian kinerja ini dibantu pula dengan berjalannya informasi lowongan kerja diumumkan melalui website Disnaker Kota Bandung yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Manajemen Ketenagakerjaan BIMMA. Informasi lowongan kerja telah terhubung dengan aplikasi BIMMA Bursa Kerja yang dapat digunakan di ponsel pintar sehingga pencari kerja dapat melihat informasi lowongan kerja setiap waktu. Berdasarkan hal-hal tersebut realisasi jumlah penempatan tenaga kerja sampai tahun 2019 dapat melebihi target yang telah ditentukan.

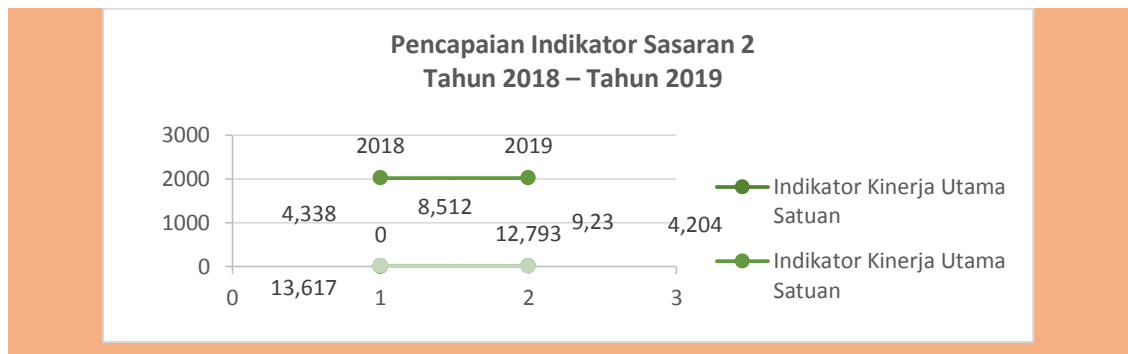
Realisasi data pendukung pencapaian sasaran 3 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18
Pencapaian Indikator Sasaran 3
Tahun 2018 – Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	TAHUN	
			2018	2019
1	2	3	4	5
1.	Lowongan Kerja Baru	Orang	13.617	12.793
2.	Pencari Kerja Terdaftar	Orang	8.512	9.230
3.	Penempatan Tenaga Kerja	Orang	4.338	4.204



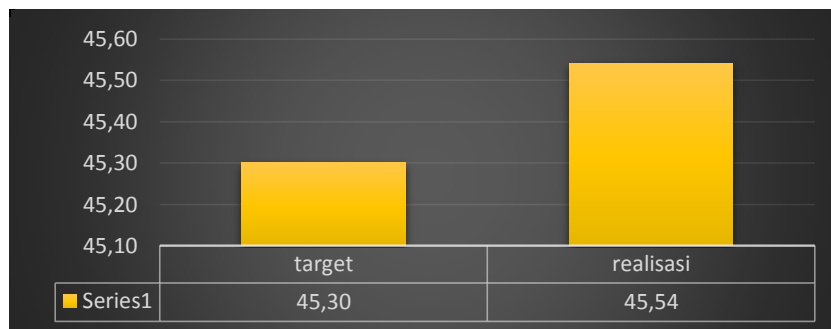
Lebih jelasnya dapat dilihat dari grafik dibawah ini:



Grafik 3.7
Perbandingan loker, pencari kerja dan penempatan tenaga kerja Tahun 2018 – Tahun 2019

Perbandingan target dan realisasi prosentase pencari kerja yang ditempatkan

Jika dibandingkan antara target dan realisasi pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2019 dapat dijelaskan dalam grafik berikut ini :



Grafik 3.8
Perbandingan target dan realisasi capaian kinerja penempatan tenaga kerja tahun 2019

Pada tahun 2019 jika membandingkan jumlah lowongan kerja yang tersedia sebesar 9.200 lowongan kerja dan penempatan sebanyak 4.100 orang terjadi kesenjangan antara penempatan tenaga kerja dan lowongan kerja yang tersedia, berarti hanya **44.56 persen** terjadi penyerapan tenaga kerja. **Permasalahannya** adalah Pencari Kerja yang ingin memperoleh pekerjaan dari pemberi kerja untuk pengisian lowongan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, serta tidak sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang tersedia atau dalam istilah ketenagakerjaan disebut antara Lowongan Kerja Tersedia dengan Pencari Kerja tidak *Link and Match*. Kurangnya tingkat kesadaran dari pihak perusahaan untuk wajib lapor lowongan dan



penempatan, kurangnya atau belum optimalnya kinerja dari pengurus bursa kerja khusus untuk laporan penempatan, tidak adanya sanksi yang berat terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan wajib lapor.

Penyelesaian masalah diatasi dengan pelatihan kerja untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan, kemudian dilakukan uji kompetensi kerja adalah pengukuran kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan. Selain itu beberapa upaya lain yang bisa dilakukan adalah melalui :

1. Penyediaan Informasi tentang Kebutuhan Tenaga Kerja/Lowongan kerja melalui Job Fair/Pameran Kerja dan Sistem Bursa Kerja On-line.
Untuk mengatasi pengangguran, perlu adanya informasi yang cepat mengenai lowongan pekerjaan. Masalah pengangguran dapat muncul karena orang tidak tahu perusahaan apa saja yang membuka lowongan kerja, atau perusahaan seperti apa yang cocok dengan keterampilan yang dimiliki. Masalah tersebut adalah persoalan informasi dan dapat diatasi dengan adanya website Disnaker dan aplikasi Bimma Bursa Kerja bagi ponsel pintar.
2. Adanya dorongan-dorongan (penyuluhan) untuk giat bekerja melalui bimbingan teknis memperbaiki kejiwaan, mental dan moralitas para pengangguran untuk melakukan hal yang berguna dan berdampak positif. Seperti; pembinaan mental, taat beragama, memperbaiki karakter, memiliki kepribadian yang baik, memperbaiki kapasitas dan kualitas yang menjadikan diri diterima di lapangan pekerjaan, karena diindikasikan penduduk Kota Bandung bila upah kerja rendah maka orang lebih suka menganggur.
3. Bisnis online
Apabila dijalankan dengan serius, sebenarnya cara ini cukup berhasil dalam mengurangi pengangguran bahkan mengatasi kemiskinan di suatu negara. Dalam menjalankan bisnis online sangatlah mudah dapat dijalankan semua orang, karena tidak diperlukan modal yang besar.

Sasaran Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja didukung oleh Program dan kegiatan dengan anggaran. Realisasi anggaran sebagai berikut :



Tabel 3.19
Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja Sasaran 2

Sasaran	Program dan Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Anggaran (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	4.273.179.880	4.053.247.003	94.85
	1. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan, Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	2.242.000.495	2.160.136.068	96.35
	2. Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	846.156.685	835.101.935	98.69
	3. Kegiatan Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	994.192.700	870.798.000	87.59
	4. Kegiatan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja TKI, TKA dan Disabilitas	190.830.000	187.211.000	98.10

Sasaran Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja ini tingkat efisiensi sebesar 26.08% dilihat dari anggaran yang digunakan sebesar 93.71% dengan tingkat capaian kinerja dari 2 indikator yang capaiannya melebihi target sebesar 119.79.00%. Sedangkan tingkat efektifitas sebesar 127.83%, pencapaian ini berasal dari perbandingan antara realisasi kinerja sebesar 100.52% dengan realisasi anggaran 93.71%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20
Analisis Efisiensi dan Efektifitas Sasaran 2
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2019

No	Sasaran	Satuan	Kinerja			Keuangan				
			Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru	lowongan kerja	9.200	12.793	139.05	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	4.273.179.880	4.053.247.003	94.85
		Presentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	45.30	45.54	100.52	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	132.758.600	75.526.800	56.89
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR					105.00	TOTAL PER SASARAN	4.405.938.480	4.128.773.803
TINGKAT EFISIENSI 26.08%										
TINGKAT EFEKTIFITAS 127.83%										

c. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3

- **Meningkatnya Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja**

Pencapaian sasaran 3 disusun 1 indikator yaitu: (1) Rasio Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB).



Misi ini menjadi target kinerja Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja. Realisasinya sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.21
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Existing Tahun 2018	Tahun 2019		Capaian kinerja (%)
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prosentase Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	Persen	58.11	58.00	58.46	100.79 tercapai Melebihi Target

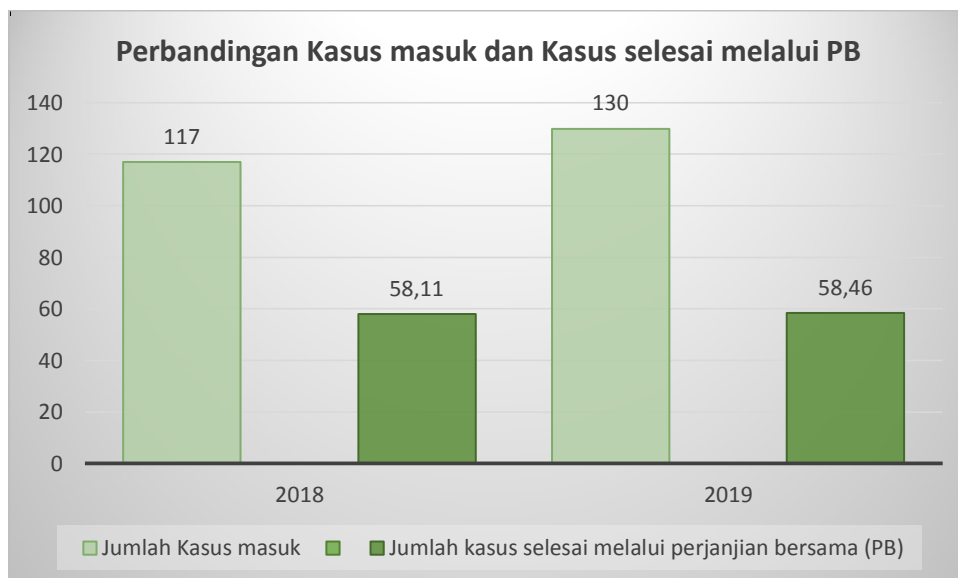
1. Indikator Prosentase Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)

Target kedua yang didasarkan pada indikator kinerja SPM Permennakertrans Nomor 2 Tahun 2014, adalah tindak lanjut penanganan target pertama yaitu 124 kasus yang masuk, target kinerja 58,00 persen dan realisasi 58,00 persen yaitu dengan perbandingan 100 kasus masuk dan 58 kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama. Dari 100 kasus, sisanya melalui anjuran 42 kasus. Berikut ini kami sajikan tabel perbandingan kasus yang masuk dengan kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama (PB) dari tahun 2018 - 2019 :

Tabel 3.22
Capaian perkembangan kasus yang masuk dan kasus selesai melalui Perjanjian Bersama Tahun 2018 - 2019

Uraian	TAHUN	
	2018	2019
Jumlah Kasus masuk	117	130
Jumlah kasus selesai melalui perjanjian bersama (PB)	58.11	58.46

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui grafik perbandingan antara kasus yang masuk dengan kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama (PB) :



Grafik 3.9

Perbandingan Kasus yang masuk dan Kasus yang selesai melalui Perjanjian Bersama Tahun 2018 –Tahun 2019

Dari tahun 2018 – 2019, angka kasus perselisihan hubungan industrial yang masuk pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung terus meningkat, ini disebabkan oleh kompleksitas permasalahan yang terjadi di perusahaan, mediasi yang dilaksanakan Disnaker tidak mudah untuk mendapatkan kesepakatan karena antara pihak berselisih yaitu perusahaan dan pekerja tetap pada pendirian masing-masing maka tidak tercapai suatu kesepakatan, sementara jumlah mediator yang ada pada Disnaker Kota Bandung tidak sebanding dengan jumlah kasus yang masuk.

Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Perselisihan Hubungan Industrial merupakan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, PHK atau perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam satu perusahaan. Suatu hal yang sangat mendukung pada kondusifitas tripartit yaitu adanya aksi Walikota Bandung yang proaktif menanggapi usulan para pengusaha dan Serikat Pekerja pada tahun 2014 Walikota Bandung langsung menghadap Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI pada saat diminta Serikat Pekerja menyampaikan usulan peningkatan jumlah item yang dijadikan alat survey dalam penentuan Kebutuhan Hidup Layak/KHL, maka hubungan industrial di Kota Bandung cukup kondusif sehingga target kinerja dapat direalisasikan dengan baik.



Target akhir RENSTRA di Tahun 2019, kasus yang dapat diselesaikan melalui Perjanjian Bersama meningkat menjadi 58.46 persen, karena trend yang terjadi berdasarkan pengalaman setiap akhir masa jabatan seorang Kepala Daerah, suhu politik meningkat, berkaitan dengan kondisi politik diluar kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung biasanya paling mudah memprovokasi para pekerja untuk dijadikan alat politik, sehingga sering terjadi demo, akibatnya kegiatan perekonomian terganggu, bisa berdampak pada terjadinya PHK. Maka untuk target ini tidak dapat diperjanjikan pada akhir RENSTRA yang otomatis berakhirnya masa Jabatan Walikota Bandung untuk menetapkan target dibawah Tahun sebelumnya.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan diantaranya adalah :

1. Meningkatkan kerjasama dan harmonisasi LKS Tripartit melalui peningkatan volume rapat-rapat koordinasi dengan semua anggota Tim berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung.
2. Semakin bertambahnya kasus perselisihan kepentingan yang sulit diselesaikan secara damai (PB), sudah menjadi keharusan adanya penambahan tenaga fungsional mediator PHI secara proporsional sehingga mediator PHI dapat melaksanakan fungsinya yang utama yaitu melakukan pembinaan hubungan industrial terhadap perusahaan untuk pencegahan terjadinya perselisihan hubungan industrial secara *prefentif*. Sehubungan tenaga fungsional mediator hanya tinggal 2 (dua) orang lagi, maka selama ini hanya fungsi penyelesaian kasus yang masuk saja yang dapat dilaksanakan. Yang terjadi seorang pejabat fungsional mediator tersita waktunya hanya untuk menyelesaikan kasus saja.
3. Fungsi pemeriksaan perusahaan yang dilaksanakan oleh fungsional Pengawas Ketenagakerjaan perlu dimaksimalkan, misalkan menyelesaikan kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan secara tuntas, sehingga pada tahun berikutnya kasus yang sama di perusahaan yang sama tidak muncul kembali.
4. Mengusulkan penambahan SDM antara lain Fungsional Mediator, dan Fungsional Umum yang Kompeten dan Mengusulkan untuk membangun/menambah ruangan tempat mediasi dan rapat-rapat.

Permasalahan yang akan dihadapi berkaitan perlindungan ketenagakerjaan pada tahun 2019 selain kurangnya tenaga fungsional mediator adalah telah ditariknya kewenangan pengawasan ketenagakerjaan beserta 15 orang fungsional Pengawas



Ketenagakerjaan sehingga bila terjadi kasus Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung tidak dapat melakukan pemeriksaan dan penindakan, yang dapat dilakukan hanyalah sampai pada tingkat pembinaan kepada perusahaan-perusahaan akan norma kerja, kesehatan perusahaan, dan kesejahteraan buruh.

Sasaran Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan didukung oleh Program dan kegiatan dengan anggaran. Realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.23

Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja Sasaran 3

Sasaran	Program dan Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Anggaran (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	2.562.601.866	2.383.320.331	93.00
	1. Kegiatan Pembinaan hubungan industrial, Peningkatan Peran Serta Fungsi Kelembagaan Ketenagakerjaan dan Pembahasan Serta Perumusan UMK Bandung	1.329.075.000	1.326.524.500	99.81
	2. Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	271.616.200	268.738.220	98.94
	3. Kegiatan Peningkatan, Pembinaan dan Perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	380.517.961	271.055.461	71.23
	4. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Persyaratan Kerja	211.594.200	188.155.200	88.92
	5. Kegiatan Pembinaan kesejahteraan Pekerja/Buruh	159.039.980	149.253.000	93.85
	6. Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	210.758.525	179.593.950	85.21

Sasaran Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan tingkat efisiensi anggaran sebesar 7.79% dilihat dari anggaran yang digunakan sebesar 93.00% dengan tingkat capaian kinerja dari indikator yang capaian rata-rata sebesar 100.79 Sedangkan tingkat efektifitas kerja sebesar 108.37%, pencapaian ini berasal dari perbandingan antara realisasi kinerja sebesar 100.79% dengan realisasi anggaran 93.00%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.24
Analisis Efisiensi dan Efektifitas Sasaran 3
Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan	Prosentase Perusahaan Yang Berkasus Tentang Ketenagakerjaan Prosentase Kasus Yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)	%	58,00	58,46	100.79	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	2.562.601.866	2.383.320.331	93.00
RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR						100.79	TOTAL PER SASARAN	2.562.601.866	2.383.320.331	93.00
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 7.79 %										
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 108.37 %										

C. Capaian Indikator Kinerja RENSTRA Pendukung

Target Kinerja pokok dalam RENSTRA menjadi Indikator Kinerja Utama yaitu nomor 1 sampai nomor 4 seperti tersebut di atas dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani Kepala Dinas Tenaga Kerja dengan Walikota Bandung, kemudian target kinerja nomor 1 sampai 5 adalah target kinerja RENSTRA yang mendukung atas ketercapaian 4 target IKU. Realisasi 1 target pendukung sebagaimana di bawah ini :

Tabel 3.25
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja Sasaran Renstra	Satuan	exiting tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian Kinerja	Target Akhir Renstra 2023	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori	80.29	79,00	82,19	104.03% Melebihi target	80	102,74 % melebihin target

D. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 4

Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) realisasi tercapai sebesar 82.19 melebihi target yang ditentukan yaitu 79.00 dengan capaian 104.03 persen.

Selanjutnya pencapaian sasaran 4 Terwujudnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik dengan satu indikator, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:



Tabel 3.26
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Tahun 2019

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Target Renstra Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Akhir Renstra
1	2	3	5	4	5	6
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setelah Dikonversi	Nilai	70.00	79.00	82.19	79.00
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	3,19	-	82.19	-
1.	Persyaratan Pelayanan	Nilai	3,27	-	3.24	-
2.	Prosedur Pelayanan	Nilai	3,20	-	3.26	-
3.	Waktu Pelayanan	Nilai	3,24	-	3.24	-
4.	Biaya Pelayanan	Nilai	4.00	-	4.00	-
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Nilai	3,13	-	3.28	-
6.	Kompetensi Pelaksana	Nilai	3,21	-	3.30	-
7.	Perilaku Pelaksana	Nilai	3,24	-	3.36	-
8.	Maklumat Pelayanan	Nilai	3,20	-	2.79	-
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Nilai	3,05	-	3.11	-

Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 ini menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Nomor 16 Tahun 2014. Terdapat 9 unsur yang harus ada sebagai dasar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, yaitu persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi Pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, dan penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Nilai Interval Konversi IKM dari 25 ke 64.99 mutu pelayanan D; dari 65.00 ke 76.60 mutu pelayanan C; interval 76.61 ke 88.30 mutu pelayanan B; kemudian interval 88.31 ke 100 mutu pelayanan A. Berdasarkan tabel di atas target penilaian IKM yang direncanakan dengan skor 79.00 dari 334 responden yang disebar dengan 9 unsur pelayanan. Sasaran survey adalah 17 Unit Pelayanan urusan ketenagakerjaan (terlampir) hasilnya mendapatkan skor IKM **Tahun 2019** nilai indeks unit pelayanan setelah dikonversi = nilai indeks x nilai dasar = 3,286 x 25 = **82.19** dan dikategorikan baik, meningkat **2.5 persen** dari Tahun 2017 sebesar **79.81**, skor IKM **Tahun 2018** nilai indeks unit pelayanan setelah dikonversi = nilai indeks x nilai dasar = 3,211 x 25 = **79,75** dan dikategorikan baik, meningkat **0,90 persen** dari Tahun 2017 sebesar **79.81**, secara menyeluruh mutu kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja mendapatkan kategori BAIK, capaian kinerja sesuai dengan yang ditargetkan menunjukkan 104.03% persen



berarti tercapai melebihi rencana yang ditetapkan. Berikut tanggapan responden terhadap pelayanan Bidang-Bidang, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.27
Tanggapan responden terhadap pelayanan Bidang-Bidang Tahun 2019

No.	Bidang	Jumlah Unit Pelayanan	Nilai
1	2	3	4
1.	Pembinaan Hubungan Industrial dan Persyaratan kerja	4	82.75/B
2.	Penempatan Tenaga Kerja	1	82.50/B
3.	Pembinaan Norma Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	7	82.25/B
4.	Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	5	81.75/B
5.	UPT Balai Latihan Kerja	1	82.00/B

Bidang Pembinaan Norma Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mendapatkan nilai 82,25 kategori B hasil survey pada Unit Pelayanan Norma, Unit Prosedur Pelayanan Pembinaan Norma, Unit Pelayanan Kesehatan Kerja.

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mendapatkan nilai 81.75 kategori B, hal ini berkaitan dengan banyaknya jenis pelatihan yang diberikan kepada para pencari kerja yang merupakan warga kota Bandung dan lulusan terbaik mendapat kesempatan mengikuti program pemagangan ke perusahaan-perusahaan untuk memberikan pengalaman bagi pencari kerja. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek di posisi terendah dengan nilai 82.75 karena bidang ini tugas pokok dan fungsinya adalah memediasi perselisihan antar pekerja/buruh dan perusahaan di Kota Bandung.

Survey dilakukan terhadap perusahaan/pekerja yang sedang berselisih, dan atau yang sudah selesai dimediasi, tentunya kepuasan pekerja dan pengusaha bisa sama atau bisa berbeda, ketika kepentingan yang berselisih tidak terpenuhi maka hasilnya tentu akan menyatakan tidak puas walaupun benar/sesuai secara norma/aturan hukum ketenagakerjaan. Kemudian di bidang yang bersangkutan sangat kekurangan SDM fungsional mediator (hanya 4 orang), sedangkan kasus perselisihan hubungan industrial yang terdaftar setiap tahun lebih dari 100 kasus, dan perlu waktu yang lama untuk penyelesaiannya. Bidang Penempatan Tenaga Kerja mendapat nilai 82.50 kategori B didapatkan dari unit pelayanan pembuatan kartu pencari kerja.

Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat efisiensi mencapai 22.14% dari capaian kinerja 104.03% dan tingkat efektivitas sebesar 127.72% dengan penggunaan anggaran sebesar 82.49%. Sedangkan tingkat efektifitas kinerja mencapai 114.17% dihitung dari perbandingan antara capaian kinerja indikator 114.00% dengan realisasi anggaran dari empat program sebesar 79.87%. Lebih lengkapnya pada tabel berikut :



Tabel 3.28
Analisis Efisiensi dan Efektifitas Sasaran 4
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai	79.00	82.19	104.03	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.388.747.763	2.817.530.752	83.14
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	16.492.054.258	13.020.234.584	78.95
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur	126.500.000	106.932.100	84.53
							Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	178.568.225	177.996.225	99.68
							RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR			104.03
TINGKAT EFISIENSI 22.14 %										
TINGKAT EFEKTIFITAS 127.72 %										

Terukurnya indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2019 serta terpetakannya kinerja pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh masing-masing unit pelayanan, teridentifikasinya harapan masyarakat akan pelayanan publik serta terpetakannya kelemahan dan kekurangan dari masing-masing unit pelayanan publik merupakan salah satu faktor pendukung dalam tercapainya indeks kepuasan masyarakat Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik diantaranya adalah :

1. Perlu adanya pemberian pelatihan dan pemahaman yang berkesinambungan bagi penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penyedia layanan yang berkualitas dengan berpedoman pada standar baku (SOP) dan standar pelayanan (SP) serta rasa tanggungjawab dalam memberikan pelayanan.
2. Perlu adanya sosialisasi program-program disnaker dan lowongan kerja kepada LPK-LPK yang ada di Kota Bandung.
3. Disnaker Kota Bandung perlu membuat forum Komunikasi di kawasan industri sebagai wadah komunikasi antar perusahaan karena selama ini perusahaan bergerak sendiri-sendiri dalam menghadapi permasalahan.

Permasalahan yang akan dihadapi berkaitan dalam meningkatkannya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya



berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparat pemerintah, mengingat fungsi utama dari pemerintah adalah untuk melayani masyarakat maka pemerintah perlu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pengukuran Kinerja 4 (empat) Sasaran RENSTRA dengan 5 (lima) indikator kinerja dikelompokkan berdasarkan kategori dengan interpretasi, sebagai berikut :

Tabel 3.29
Pencapaian Kinerja Sasaran RENSTRA
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	2	3
1	Tidak Ada Target	0
2	Tidak Tercapai	0
3	Tercapai sesuai target	0
4	Melebihi Target	6
	Jumlah	6

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci sesuai Misi dan Sasaran, rata-rata capaian dari pengukuran kinerja dapat dilihat dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.30
Capaian Kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2019

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian Sasaran	n/a	< 100%	= 100%	>100%
I	Misi 3: Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan						
1.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Prosentase Pengangguran yang Kompeten dan Ditempatkan	117.51	-	-	-	117.51
2.	Meningkatnya Penempatan Kerja	Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	119.785	-	-	-	100.52
		Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru		-	-	-	139.05
3.	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Rasio Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)	100.79	-	-	-	100.79
4.	Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	104.03	-	-	-	104.03
		Temuan BPK/Inspektorat diselesaikan		-	-	-	WTP

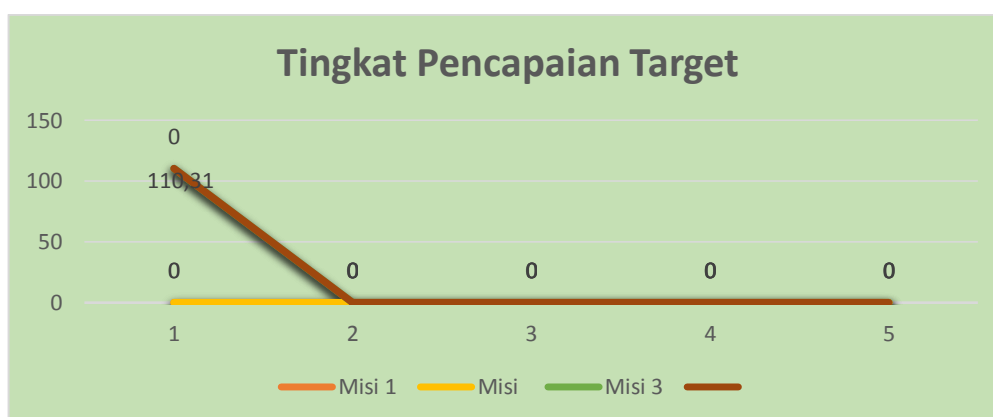


Pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran Misi terhadap target yang sudah ditetapkan dilihat dari tingkat pencapaian target, sebagai berikut:

Tabel 3.31
Pencapaian target Misi RENSTRA Tahun 2019

Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Rata-rata capaian Misi (%)	Tingkat Pencapaian Target			
			Melebihi (>100%)	Tercapai (=100%)	Tidak Tercapai (<100%)	Tidak Ada
1	2	3	4	5	6	7
Misi 1	-	-	-	-	-	-
Misi 2	-	-	-	-	-	-
Misi 3	6	110.31	6	-	-	-
Misi 4	-	-	-	-	-	-
Jumlah	6	110.31%	6	-	-	-

Berikut ini grafik pencapaian target misi Renstra Tahun 2019 :



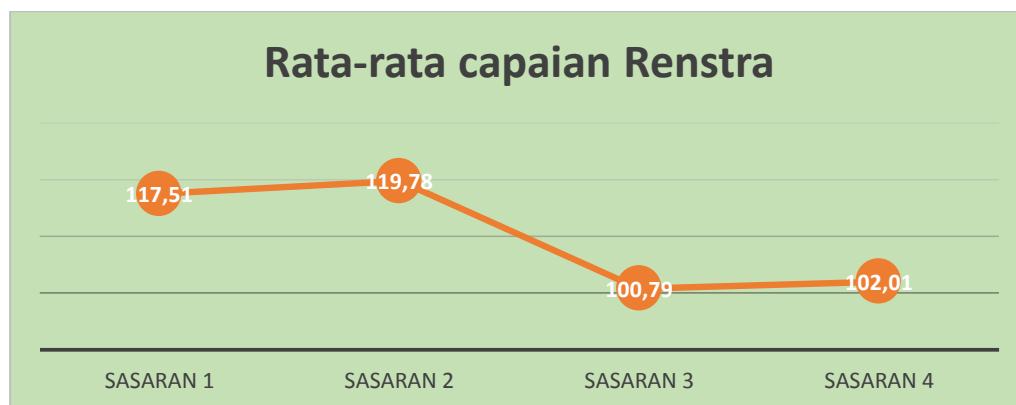
Grafik 3.10
Pencapaian Target Misi Renstra Tahun 2019

Kemudian selanjutnya kinerja pencapaian dirinci menurut kategori pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.32
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran RENSTRA
Dinas Tenaga Kerja Tahun 2019

Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Rata-rata capaian Sasaran (%)	Tingkat Pencapaian Target			
			Melebihi (>100%)	Tercapai (=100%)	Tidak Tercapai (<100%)	Tidak Ada
Sasaran 1	1	117.51	1	-	-	-
Sasaran 2	2	119.78	1	-	-	-
Sasaran 3	1	100.79	1	-	-	-
Sasaran 4	1	102.01	1	-	-	-

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran RENSTRA dijelaskan dalam grafik berikut ini:



Grafik 3.11
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Renstra

Untuk mengukur keseluruhan kinerja Dinas Tenaga Kerja baik terhadap kinerja teknis, pelayanan publik dan pengukuran kinerja internal tercermin atau sudah terwakili dalam empat misi, tujuh sasaran dan tiga belas indikator sebagaimana dijelaskan di atas. Misi yang disusun dalam RENSTRA Dinas Tenaga Kerja merupakan jawaban “Mengapa Dinas Tenaga Kerja menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kota Bandung”. Disnaker menangani permasalahan ketenagakerjaan dari awal (**pre employment**), yaitu penganggur dan pencari kerja, kemudian setelah tidak mendapatkan pekerjaan (**post employment**) yaitu pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan tenaga kerja kurang produktif, penanganannya diakomodir dalam Misi 3 “Membangun Perekonomian yang mandiri, Kokoh dan berkeadilan, ”. Kemudian penanganan ketika sedang bekerja atau disebut **during employment** yaitu melindungi perusahaan dan pekerja ketika sedang bekerja, dicerminkan dalam Misi 2 (dua) Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan.



Misi 4 (empat) Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*), dua sasaran yaitu Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dengan satu indikator yaitu Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikatornya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Misi ini sebagai misi pendukung yang tetap penting untuk menilai dan mengukur kinerja pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang serta untuk mengukur kepuasan dan harapan masyarakat terhadap kinerja Dinas Tenaga Kerja.

a. Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dalam mencapai target kinerja pada Tahun 2019 ini, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sudah menyusun Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang dijelaskan pada tabel dibawah ini:



**Rencana Aksi Dinas Tenaga Kerja
Periode 2018 - 2023
Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Output Kegiatan	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Jumlah Calon Wirausaha Baru	Orang	Trw 1 = 240 Trw 2 = 260 Trw 3 = 180 Trw 4 = 20	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.078.833.493	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	1.189.676.391	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dan sertifikasi	Trw 1 = 40	Erwin Robiyansyah, SE., M.AP
										Trw 2 = 40	
										Trw 3 = 40	
										Trw 4 = 40	
							Pemagangan Dalam Negeri	355.551.412	Jumlah Pemagangan	Trw 1 = 0	Bambang Purwanto, SE
										Trw 2 = 20	
										Trw 3 = 20	
										Trw 4 = 0	
							Peningkatan Produktivitas dan Kompetensi Lembaga Pelatihan Kerja	254.933.790	Jumlah LPK yang di akreditasi	Trw 1 = 0	R. Windarjunah, S.IP
										Trw 2 = 0	
										Trw 3 = 0	
										Trw 4 = 10	
Jumlah Peserta Bimtek Akreditasi		Jumlah Peserta Bimtek Akreditasi	Trw 1 = 0								
			Trw 2 = 0								
			Trw 3 = 20								
			Trw 4 = 0								
Jumlah Peserta Bimtek Metodologi		Jumlah Peserta Bimtek Metodologi	Trw 1 = 0								
			Trw 2 = 20								
			Trw 3 = 0								
			Trw 4 = 0								



									Jumlah Peserta Competency Base Training (CBT)	Trw 1 = 20	
										Trw 2 = 0	
										Trw 3 = 0	
										Trw 4 = 20	
2	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru	lowongan kerja	Trw 1 = 1700 Trw 2 = 2500 Trw 3 = 2500 Trw 4 = 2500	Program peningkatan kesempatan kerja	5.134.153.733	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	2.594.806.303	Jumlah Peserta Pelatihan Calon Wirausaha Baru, Pelatihan Produktivitas dan pembekalan	Trw 1 = 200 Trw 2 = 200 Trw 3 = 120 Trw 4 = 0	Dra. Raden Rika Suantika, M.AP
							Perluasan kesempatan kerja	983.839.430	Jumlah Peserta Kegiatan Pemberian Kerja Sementara untuk para penganggur usia tidak produktif	Trw 1 = 1 Trw 2 = 2 Trw 3 = 2 Trw 4 = 1	Hendry Hendarman, SE
									Jumlah Kelompok Wirausaha Baru	Trw 1 = 2 Trw 2 = 3 Trw 3 = 3 Trw 4 = 1	Hendry Hendarman, SE
									Jumlah data Lowongan kerja	Trw 1 = 1700 Trw 2 = 2500 Trw 3 = 2500 Trw 4 = 2500	Dra. Sesy Febriani
							Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	1.282.828.000	Jumlah Sosialisasi Bursa Kerja Khusus (BKK)	Trw 1 = 0 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 0	Dra. Sesy Febriani
									Jumlah Pameran Bursa Kerja	Trw 1 = 1 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1	



							Facilitas Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja	272.680.000	Jumlah Pembinaan/monitoring TKI/Tenaga Kerja Asing (TKA)/disabilitas	Trw 1 = 15 Trw 2 = 15 Trw 3 = 15 Trw 4 = 15	Hj. Ety Kosasih., S.IP
		Prosentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	Trw 1 = 0 Trw 2 = 2 Trw 3 = 1 Trw 4 = 0	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	187.758.600	Pengeralahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	187.758.600	Jumlah Masyarakat yang diberikan penyuluhan bertransmigrasi	Trw 1 = 0 Trw 2 = 120 Trw 3 = 0 Trw 4 = 0	Hj. Ety Kosasih., S.IP
3	Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan	Prosentase Kasus Yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)	%	Trw 1 = 14,00 Trw 2 = 14,00 Trw 3 = 15,00 Trw 4 = 15,00	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	2.803.215.305	Pembinaan hubungan industrial, peningkatan peran serta fungsi kelembagaan ketenagakerjaan dan pembahasan serta perumusan UMK Bandung	1.427.775.000	Jumlah Pembinaan hubungan industrial, peningkatan peran serta fungsi kelembagaan ketenagakerjaan dan pembahasan serta perumusan UMK Bandung	Trw 1 = 1 Trw 2 = 1 Trw 3 = 0 Trw 4 = 1	R. Indartriani, SH
								Jumlah Pekerja Teladan	Trw 1 = 0 Trw 2 = 35 Trw 3 = 0 Trw 4 = 0		
								Jumlah Rapat Dewan Pengupahan Kota (DPK)	Trw 1 = 2 Trw 2 = 2 Trw 3 = 3 Trw 4 = 3		
								Jumlah Rapat LKS Tripartit	Trw 1 = 2 Trw 2 = 2 Trw 3 = 3 Trw 4 = 3		
								Jumlah Usulan Penghargaan LKS Tripartit Award	Trw 1 = 0 Trw 2 = 0 Trw 3 = 0		



										Trw 4 = 1		
									Jumlah Usulan Rekomendasi UMK Tahun 2018	Trw 1 = 0		
								Trw 2 = 0				
								Trw 3 = 0				
								Trw 4 = 1				
									Peringatan hari buruh internasional (mayday)	Trw 1 = 0		
								Trw 2 = 1				
								Trw 3 = 0				
								Trw 4 = 0				
									Sosialisasi UMK dan Struktur Skala Upah	Trw 1 = 0		
								Trw 2 = 0				
								Trw 3 = 1				
								Trw 4 = 1				
									Jumlah Penguatan para mediator, Pengusaha dan Pekerja	Trw 1 = 0		
								Trw 2 = 0				
								Trw 3 = 40				
								Trw 4 = 0				
								250.623.525	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	Trw 1 = 20	HJ. Asri Gartini ST.,MT
											Trw 2 = 30	
											Trw 3 = 25	
											Trw 4 = 25	
									Peningkatan kemampuan bagi unsur pekerja dan pengusaha	Trw 1 = 0		
								Trw 2 = 75				
								Trw 3 = 75				
								Trw 4 = 0				
								159.039.980	Fasilitasi Pembinaan Kesejahteraan Pekerja Buruh	Jumlah peserta diseminasi peraturan perundang-undangan kesejahteraan	Trw 1 = 0	Ir. Asep Sarifudin
											Trw 2 = 100	
											Trw 3 = 100	



									pekerja bagi Perusahaan di Kota Bandung	Trw 4 = 0	
							Fasilitasi dan Penyebarluasan Informasi Persyaratan Kerja	233.619.200	Jumlah Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Persyaratan Kerja	Trw 1 = 0 Trw 2 = 100 Trw 3 = 140 Trw 4 = 0	Agus Suparman. S.Sos., M.Si
									Pembinaan Pembuatan Peraturan Perusahaan	Trw 1 = 0 Trw 2 = 0 Trw 3 = 50 Trw 4 = 0	
							Peningkatan dan Pembinaan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	271.616.200	Jumlah peserta peningkatan pengetahuan dan pemahaman peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, Norma jaminan sosial keteagakerjaan dan kesetaraan perlakuan dan kesempatan kerja/equal employment opportunity (EEO) di perusahaan	Trw 1 = 100 Trw 2 = 100 Trw 3 = 50 Trw 4 = 0	Dra. Nani Asmawati I.S
							Peningkatan, pembinaan dan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	460.541.400	Jumlah peserta peningkatan kompetensi kerja bagi pekerjaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	Trw 1 = 0 Trw 2 = 0 Trw 3 = 40 Trw 4 = 0	Merry Andriany Amir, SE
4	Meningkatnya	Indeks	nilai	Trw 1 = 0	Program	3.727.713.579	Kegiatan Penyediaan	54.080.500	Jumlah Kebutuhan	Trw 1 = 3	Hj. Rina Indrisari



Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik	Kepuasan Masyarakat (IKM)		Trw 2 = 0	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Jasa Surat Menyurat		Penyediaa Surat Menyurat	Trw 2 = 3	Nugraha, S.Ip. M.AP
			Trw 3 = 71,00						Trw 3 = 3	
			Trw 4 = 0						Trw 4 = 3	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	536.888.747	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Trw 1 = 3 Trw 2 = 3 Trw 3 = 3 Trw 4 = 3	Hj. Rina Indrisari Nugraha, S.Ip. M.AP
						Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	59.675.000	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Trw 1 = 0 Trw 2 = 1 Trw 3 = 0 Trw 4 = 0	Hj. Rina Indrisari Nugraha, S.Ip. M.AP
						Penyediaan Alat Tulis Kantor	227.818.164	Jumlah Kebutuhan Alat Tulis Kantor	Trw 1 = 1 Trw 2 = 1 Trw 3 = 0 Trw 4 = 0	Hj. Rina Indrisari Nugraha, S.Ip. M.AP
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	197.601.800	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Trw 1 = 3 Trw 2 = 3 Trw 3 = 3 Trw 4 = 3	Hj. Rina Indrisari Nugraha, S.Ip. M.AP
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.997.492	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Alat Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Trw 1 = 0 Trw 2 = 0 Trw 3 = 0 Trw 4 = 0	Hj. Rina Indrisari Nugraha, S.Ip. M.AP
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	73.582.080	jumlah kebutuhan penyediaan peralatan rumah tangga	Trw 1 = 1 Trw 2 = 0 Trw 3 = 0 Trw 4 = 0	Hj. Rina Indrisari Nugraha, S.Ip. M.AP



							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	762.430.000	jumlah kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Trw 1 = 3 Trw 2 = 3 Trw 3 = 3 Trw 4 = 3	Hj. Rina Indrisari Nugraha, S.Ip. M.AP
									jumlah kebutuhan iklan	Trw 1 = 2 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 0	
							Penyediaan Makanan dan Minuman	156.875.000	jumlah kebutuhan penyediaan makan dan minuman Dinas	Trw 1 = 4 Trw 2 = 4 Trw 3 = 4 Trw 4 = 0	Hj. Rina Indrisari Nugraha, S.Ip. M.AP
							Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	721.348.900	Jumlah Kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Trw 1 = 3 Trw 2 = 3 Trw 3 = 3 Trw 4 = 3	Hj. Rina Indrisari Nugraha, S.Ip. M.AP
							Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan pengemudi kendaraan operasional kantor	525.589.350	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan pengemudi kendaraan operasional kantor	Trw 1 = 1 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1	Hj. Rina Indrisari Nugraha, S.Ip. M.AP
							Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	361.826.546	jumlah laporan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Trw 1 = 3 Trw 2 = 3 Trw 3 = 3 Trw 4 = 3	Hj. Rina Indrisari Nugraha, S.Ip. M.AP
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	19.103.210.027	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	88.372.349	Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor	Trw 1 = 0 Trw 2 = 2 Trw 3 = 0 Trw 4 = 0	Hj. Rina Indrisari Nugraha, S.Ip. M.AP



						Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	790.191.468	Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Trw 1 = 49 Trw 2 = 49 Trw 3 = 49 Trw 4 = 49	Hj. Rina Indrisari Nugraha, S.Ip. M.AP	
						Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	263.481.240	Tersedianya Peralatan Kantor	Trw 1 = 0 Trw 2 = 36 Trw 3 = 0 Trw 4 = 0	Hj. Rina Indrisari Nugraha, S.Ip. M.AP	
						Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	17.961.164.970	Jumlah laporan terwujudnya gedung kantor	Trw 1 = 0 Trw 2 = 0 Trw 3 = 1 Trw 4 = 0	Hj. Rina Indrisari Nugraha, S.Ip. M.AP	
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	170.500.000	170.500.000	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Trw 1 = 0 Trw 2 = 290 Trw 3 = 0 Trw 4 = 0	Hj. Rina Indrisari Nugraha, S.Ip. M.AP
					Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Penyusunan dan Pengelolaan Data dan Informasi Ketenagakerjaan	178.671.900	178.671.900	Tersusunnya Rancangan Peraturan Wali Kota ttg Ketenagakerjaan	Trw 1 = 0 Trw 2 = 0 Trw 3 = 1 Trw 4 = 0	Diah Mutiarawati, S.ST
								Jumlah pengembangan Aplikasi (BIMMA)	Trw 1 = 0 Trw 2 = 1 Trw 3 = 0 Trw 4 = 0		
								Jumlah Data Base Ketenagakerjaan	Trw 1 = 0 Trw 2 = 1 Trw 3 = 0 Trw 4 = 0		



3.4. Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung total nilai sebesar Rp.29.025.252.185.00 realisasi anggaran mencapai Rp. 24.305.274.645 atau serapan dana APBD mencapai **83.74%**, dengan demikian SiLPA (Sisa Lebih Pendapatan dan Anggaran) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2018 sebesar Rp. 4.719.977.540 Sisa anggaran dikarenakan tidak mencukupi waktu untuk realisasi anggaran dan ada penghematan hasil dari negosiasi pengadaan.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.33
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Berdasarkan Misi RENSTRA
Tahun 2019

No	Misi	Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran Triwulan 4 (Rp.)	Persen
1	2	3	4	5	6
1	Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.388.747.763.00	2.817.530.752.00	83.14
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	16.492.054.258.00	13.020.234.584.00	78.95
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	126.500.000.00	106.932.100.00	84.53
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.049.409.818.00	1.848.483.075.00	90.20
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	4.273.179.880.00	4.053.247.003.00	94.85
		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	2.562.601.866,08	2.383.320.331.00	93.00
		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	132.758.600.00	75.526.800.00	56.89
	Jumlah		29.025.252.186.00	24.305.274.645.00	83.74



Dari tabel di atas diketahui realisasi anggaran Tahun 2019 adalah Rp. **24.305.274.645.00** Dari tabel di atas diketahui realisasi anggaran sampai Tahun 2019 sebesar **83.74 persen**.

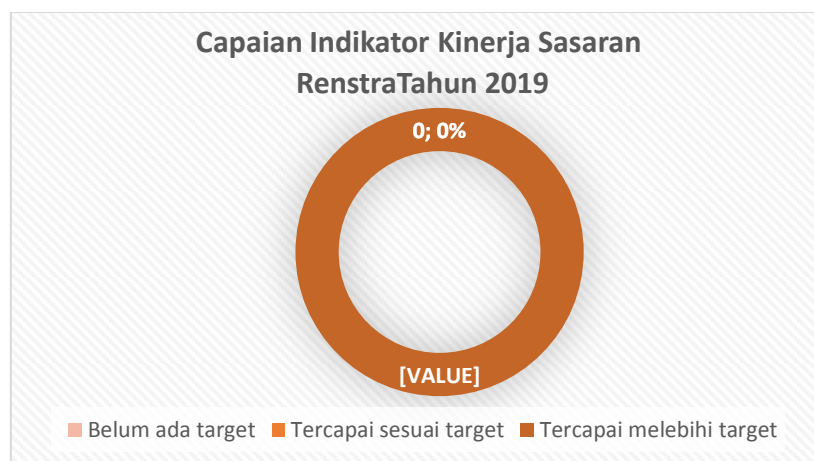
BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2019. Penyusunan LKIP ini merupakan amanat yang tertuang dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai harapan semua pihak.

LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2019 ini menggambarkan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, kinerja anggaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menetapkan 4 sasaran dengan 6 indikator kinerja sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :



Grafik 4.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA Tahun 2019



Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Tahun 2019 ditetapkan 4 sasaran dengan 6 indikator sasaran, hasil pengukuran terhadap Indikator kinerja sasaran renstra sebagai berikut:

6 indikator atau 100.00% tercapai melebihi target dengan kategori sangat baik

Pada Tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung total nilai sebesar **Rp. 29.025.252.186.06** sampai dengan triwulan 4 terealisasi sebesar **Rp. 24.305.274.645.00**.

Secara efektif anggaran tersebut telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung masuk dalam kategori memuaskan, namun masih belum maksimal, efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan kinerja serta pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2019 ini, adalah merupakan gambaran Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung selama satu tahun.

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA BANDUNG**

**DRS. ARIEF SYAIFUDIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19690111 199603 1.002**

